

Collaborative Governance dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo

Delila Putri Sadayi¹, Sahat Sianturi², Lubna Salsabila³

¹ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

^{2,3} Universitas Putera Batam, Jalan R. Soeprato, Muka Kuning, Batam 29439, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 1 Februari 2022

Revisi Akhir: 15 Februari 2022

Diterbitkan Online: 28 Februari 2022

KATA KUNCI

Collaborative Governance, Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat

KORESPONDENSI

E-mail: lubna.salsa@gmail.com

A B S T R A C T

Poverty is a complex issue for the Indonesian people. Both the central and regional governments are making various efforts to address the issue of poverty. According to Regional Autonomy Law No. 32 of 2004, the Central Government delegated authority to regional governments to control affairs in the regions in accordance with the conditions of their individual areas. This study focused on Kulon Progo Regency, which had the highest poverty rate in the Special Region of Yogyakarta when compared to other districts. Because Kulon Progo Regency has favorable geographical circumstances in the agricultural and plantation sectors, the majority of the population is employed in these industries. To address the issue of poverty, the Kulon Progo Regency Government employs an alternative development paradigm. The implementation of the alternative development paradigm program necessitates interactive engagement among the parties involved, necessitating the use of a collaborative governance approach. State actors as well as non-state actors are involved. The purpose of this research is to identify the concept of collaborative governance in poverty alleviation in Kulon Progo Regency. According to the findings of this study, the community as a subject and object/actor is critical in the concept of collaborative governance in poverty alleviation. In order to promote social resilience, the community is meant to be able to produce money on its own through community empowerment.

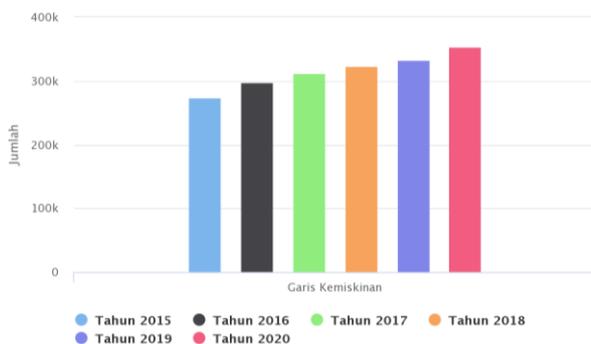
1. PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konsep collaborative governance dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. Kemiskinan menjadi permasalahan kompleks kehidupan masyarakat. Kemiskinan terjadi disebabkan atas fenomena alamiah dan fenomena buatan. Kemiskinan alami terjadi akibat dari terbatasnya sumber daya alam yang dapat tersedia dan dapat dikelola, terbatasnya teknologi canggih yang mumpuni, dan akibat dari bencana alam (Rizal, Sumaryati, & Suprihana, 2016). Sedangkan

kemiskinan buatan terjadi akibat dari pemerintah dalam membuat kebijakan yang merugikan masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat bekerja dan tidak memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari segala aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya (Mussadun & Nurpratiwi, 2016). Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana tidak bisa mengakses segala bentuk kebutuhan baik dari bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Menurut Chambers, kemiskinan merupakan suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi diantaranya adalah; kemiskinan (proper), ketidakberdayaan (powerless),

kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency) ketergantungan (dependence), dan keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis (Hudayana & Nurhadi, 2020). Kemiskinan menjadi masalah yang sangat kompleks terjadi di setiap daerah di Indonesia, sehingga hal ini menjadi perhatian utama negara dalam mengatasi permasalahan ini.

Salah satu daerah dengan tingkat ketimpangan dan kemiskinan paling tinggi di Indonesia yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya Kabupaten Kulon Progo dengan tingkat ketimpangan dan angka kemiskinan sebesar 18.01% pada tahun 2020, di mana angka kemiskinan ini telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 17.39% (satudata.kulonprogokab.go.id). Kabupaten Kulon Progo sebagai penyandang gelar kabupaten termiskin di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rasio gini sebesar 0,340 persen (sumber). Hal ini dapat dilihat besar garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015-2020 sebagai berikut



Sumber: satudata.kulonprogokab.go.id

Gambar 1 Angka Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2017-2019

Dilihat pada gambar (1) menunjukkan garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015-2020 meningkat. Pada tahun 2015 garis kemiskinan berada pada jumlah 273436 menjadi 353807 pada tahun 2020, artinya dari tahun 2015 ke 2020 mengalami peningkatan sebesar 80371. Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo menjadi urgensi dalam penelitian ini, terlebih sebelumnya telah dilaksanakan program pengentasan kemiskinan melalui program one village one sister company. Sehingga penelitian ini akan mengevaluasi program one village one sister company dalam pengentasan kemiskinan berdasarkan pada konsep collaborative governance.

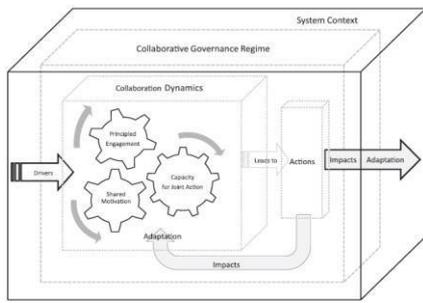
Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana tidak bisa mengakses segala bentuk kebutuhan baik dari bidang sosial,

politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemiskinan dalam kehidupan ini dibagi menjadi dalam empat bentuk diantaranya adalah sebagai berikut; a) Kemiskinan absolut; kemiskinan ini terjadi apabila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, perumahan dan yang lainnya, b) Kemiskinan relatif; kemiskinan ini terjadi karena pengaruh dari kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah sehingga merugikan masyarakat tertentu dan menyebabkan terjadinya ketimpangan di masyarakat, c) Kemiskinan kultural; kemiskinan kultural terjadi karena mengacu pada sikap individu dari masyarakat itu sendiri yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti misalnya dengan malas bekerja, pemboros, tidak mau memperbaiki tingkat kehidupan dan lain sebagainya, d) Kemiskinan struktural; kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya akses dalam memanfaatkan sumber daya yang terjadi pada suatu sistem sosial budaya dan politik yang tidak mendukung adanya kebebasan kemiskinan.

Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan memberikan amanatnya kepada pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi daerah yang dimiliki oleh setiap daerah otonom yang ada di Indonesia (Razali & Putri, 2018). Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004, Otonomi daerah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh setiap daerah otonom untuk mengurus dan menjalankan pemerintahannya sesuai dengan kondisi pada masing-masing daerahnya sendiri. Pengentasan kemiskinan dapat diatasi oleh pemerintah dengan mengintegrasikannya melalui setiap daerah otonom (Husain, 2019). Melalui kebijakan otonomi daerah, daerah memiliki kewenangannya dalam penanganan kemiskinan dengan melibatkan lembaga-lembaga pemerintahan, masyarakat, maupun swasta yang terlibat dalam konsep collaborative governance.

2. LITERATUR REVIEW

Collaborative Governance merupakan proses dan struktur publik dalam pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan yang melibatkan orang secara konstruktif di seluruh Indonesia, meliputi badan publik, pemerintahan, swasta, dan sipil untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak dapat dicapai (Purnomo, 2020). Konsep collaborative governance menurut Emerson, Nbatchi, & Balogh, 2012 yang menggambarkan kerangka integrative menjadi tiga dimensi yaitu ; (1) general system context, (2) collaborative governance regime (CGR); dan (3) collaborative dynamics dan actions (Kurniasih, 2017).



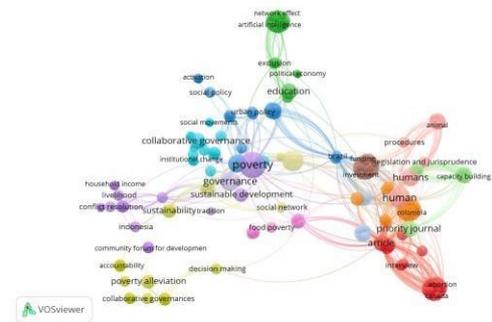
Sumber : (Emerson et al., 2012)

Gambar 2. The Integrative Framework for Collaborative Governance

Berdasarkan gambaran kerangka integrative menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) Collaborative System Context meliputi lingkungan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tata kelola kolaborasi dengan menghasilkan kesempatan dan keterbatasan (Kurniasih, 2017). Berbagai lingkungan politik, sosial-ekonomi, lingkungan hidup dan lainnya saling mempengaruhi dinamika kerja sama, sehingga muncul penggerak (drivers) termasuk kepemimpinan (leadership), insentif penyebab (consequential incentives), saling ketergantungan (interdependence), dan ketidakpastian (uncertainty) yang akan menjalankan dan mengarahkan collaborative governance regime (CGR) (Putra, 2019). Sedangkan dalam collaborative dynamics memiliki tiga komponen yang menjadi alat penggerak (drivers) yang meliputi, pelibatan prinsip (principled engagement); motivasi bersama (shared motivation); dan kemampuan untuk melakukan tindakan (capacity for joint action) (Sururi, 2018). Ke-tiga komponen ini saling bekerja sama memperkuat dan menggerakkan untuk menghasilkan tindakan kolaboratif (collaborative action) sehingga terjadi stimultan sebuah aksi atau langkah untuk mengimplementasikan tujuan bersama. Setelah terjadinya tindakan kolaboratif bersama CGR (collaborative governance regime) akan membentuk outcome dengan menghasilkan implikasi. Adapun implikasi yang akan ditimbulkan dalam penelitian ini adalah pengentasan kemiskinan melalui konsep collaborative governance dalam pengentasan kemiskinan.

Penelitian serupa terkait dengan collaborative governance dalam pengentasan kemiskinan di antaranya penelitian dengan judul, "Collaborative Governance dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa Kohod" yang di tulis oleh Siti Yulyanah dan Riska Sarofah dalam penelitiannya memiliki hasil penelitian bahwa collaborative governance efektif diterapkan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dalam penelitian ini stakeholder yang

terlibat adalah OASE (Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja), Pemerintah Pusat dan Daerah, hingga Pemerintah Desa bersama dengan pihak swasta melalui CSR saling berkolaborasi bersama untuk memberdayakan masyarakat meskipun belum menghasilkan penurunan angka kemiskinan yang signifikan namun menunjukkan proses kolaborasi membuat masyarakat menjadi mandiri dan memiliki infrastruktur yang cukup memadai (Yulyanah & Sarofah, 2019). Dalam penelitian, "Strategi Tata Kelola Kolaboratif antara Aktor Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan," menjelaskan bahwasanya tata kelola kolaboratif yang dilakukan oleh Grameen Bank di Bangladesh bahwa konsep mendasar dalam pengentasan kemiskinan dapat di dorong melalui pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme social collateral, sistem ini membentuk sistem ketahanan sosial masyarakat (Putra, 2019). Peneliti juga menganalisa terkait dengan keterhubungan collaborative governance dengan kemiskinan dari 50 jurnal scopus yang dapat dilihat pada gambar berikut ini;



Sumber : VOSviewer Analisis

Gambar 3 Keywords Co-occurrence of Collaborative

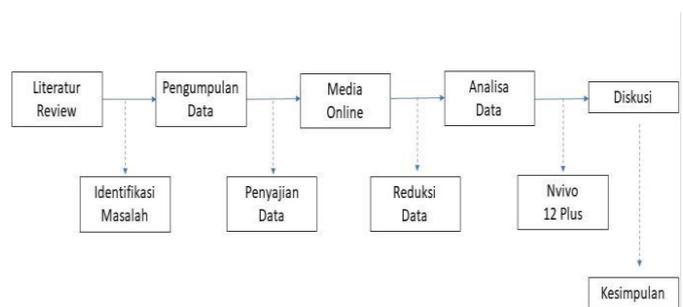
Gambar 3 merupakan hasil analisa Jurnal Scopus sebanyak 50 jurnal dengan rentang waktu tahun 2018-2020 yang dianalisa melalui aplikasi vosviewer. Berdasarkan pada analisa tersebut penulis menemukan hasil bahwa terdapat keterkaitan antara collaborative governance dengan kemiskinan atau poverty. Hal ini dilihat dari gambar (2) hasil analisa tersebut bahwa poverty memiliki kedekatan dengan collaborative governance sehingga dapat disimpulkan bahwa collaborative governance menjadi salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil keterkaitan antara collaborative governance dan kemiskinan, maka penulis ingin mengevaluasi konsep collaborative governance yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pengentasan kemiskinan melalui program one village one sister company.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konsep collaborative governance dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan model time series dari tahun 2012-2021. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diolah menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus yang kemudian di analisis untuk dapat melihat hasil evaluasi berdasarkan indikator penelitian.

3. METODOLOGI

Penelitian ini akan mengevaluasi konsep collaborative governance dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo melalui program One Village One Sister Company. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yakni penelitian yang berusaha menerangkan atau menggambarkan peristiwa yang terjadi pada objek penelitian pada masa sekarang kemudian dijelaskan, dianalisis, dan disajikan sedemikian rupa, sehingga menjadi gambaran yang sistematis dan menghasilkan sebuah solusi yang inovatif untuk mengentaskan sebuah permasalahan (Anisa, 2016). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak-pihak lain (Sutiono & Musyafiq, 2020).

Data yang penulis kumpulkan ini bersumber dari jurnal-jurnal tentang collaborative governance dan pengentasan kemiskinan. Sumber lain yang mendukung yaitu website resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo, media onlinedan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo, jurnal dan artikelyang telah diidentifikasi, dianalisis, diklarifikasi, dan diinterpretasi, sehingga menjadi karya yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu penulis mengambil data dari berita-berita dari tahun 2012-2020 yang berkaitan dengan program yang akan dievaluasi yaitu program one village one sister company di Kabupaten Kulon Progo sebagai bentuk upaya pengentasan kemiskinan. Data yang diperoleh akan dianalisa menggunakan aplikasi Nvivo 12 plus sehingga menghasilkan data yang kemudian dianalisa secara deskriptif. Adapun alur metode penelitian dalam penelitian ini dapat di lihat sebagai berikut:



Sumber: diolah oleh penulis, 2022

Gambar 4 alur metode penelitian

Berdasarkan pada gambar (3) dapat dilihat alur metode penelitian pada penelitian ini. pertama yang dilakukan oleh penulis dengan mengkaji literatur review terkait dengan collaborative governance dan poverty yang kemudian di analisa melalui aplikasi vosviewer untuk mengetahui keterkaitan dari collaborative governance dalam pengentasan kemiskinan. Selanjutnya diidentifikasi terkait dengan permasalahan yang ada, penulis mengambil Kabupaten Kulon Progo sebagai objek penelitian. Setelah mengidentifikasi masalah, selanjutnya dilakukan penyajian data melalui media online yaitu berita-berita yang terkait dengan collaborative governance dalam pengentasan kemiskinan melalui program one village one sister company. Setelah data terkumpulkan selanjutnya dilakukan reduksi data yang dianalisa menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus sehingga memperoleh hasil untuk di diskusikan sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait dengan evaluasi konsep collaborative governace dalam pengentasan kemiskinan melalui program one village one sister company.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Collaborative Governance Dalam Pengentasan Kemiskinan (Analisa Berdasarkan Pada Indikator Collaborative Governance)

Collaborative Governance merupakan proses dan struktur publik dalam pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan yang melibatkan orang secara konstruktif di seluruh Indonesia, meliputi badan publik, pemerintahan, swasta, dan sipil untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak dapat dicapai (Purnomo, 2020). Konsep collaborative governance menurut Emerson, Nbatchi, & Balogh, 2012 yang menggambarkan kerangka integrative menjadi tiga dimensi yaitu ; (1) general system context,(2) collaborative governance regime(CGR); dan (3) collaborative dynamics dan actions. (Kurniasih, 2017) Collaborative System Context : Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana tidak bisa mengakses segala bentuk kebutuhan baik dari bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Menurut Chambers, kemiskinan merupakan suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi diantaranya adalah ; kemiskinan (proper), ketidakberdayaan (powerless), kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency) ketergantungan (dependence), dan keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis (Hudayana & Nurhadi, 2020).

Konteks kemiskinan yang terjadi menjadi system context yang memberikan pengaruh dalam dinamika kerja sama tata kelola kolaboratif. Sebagian besar penduduk bekerja dalam sektor pertanian dan perkebunan dengan presentase 51,89% pada tahun 2014 (Sinangkis-Bappeda Kulon Progo, 2014). Dalam hal ini system context kemiskinan dengan presentase pekerjaan penduduk dalam sektor pertanian dan perkebunan menghasilkan kesempatan dan keterbatasan. Artinya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui paradigma pembangunan alternatif yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah sebagai penggerak (drivers) dalam konsep collaborative governance regime (CGR).

Collaborative Dynamics: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengentasan Kemiskinan

Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) dalam (Alamsyah, Mustari, Nuryanti, Rudi Mone, dan Ansyari., 2019) collaborative dynamics memiliki tiga komponen yaitu, pelibatan prinsip (principled engagement); motivasi bersama (shared motivation); dan kemampuan untuk melakukan tindakan (capacity for joint action). Kemampuan untuk melakukan tindakan dalam upaya memaksimalkan konsep collaborative governance melalui paradigma pembangunan alternative, pemerintah kabupaten Kulon Progo menginisiasikan beberapa program sebagai sarana pengentasan kemiskinan. Program serta inovasi kebijakan yang dibuat pemerintah Kulon Progo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo sebagai upaya pengentasan kemiskinan di daerah tersebut ialah sebagai berikut;

1. Program Bela Beli Kulon Progo

Bela Beli Kulon Progo ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat Kulon Progo untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan meningkatkan produk lokal masyarakat,

- a. Air Kulon Progo (Air Ku) : merupakan produk air mineral yang di produksi melalui PDAM.

- b. GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) : pemerintah memfasilitasi petani untuk memproduksi beras yang banyak. Hal ini dibuat untuk melindungi dan mensejahterakan para petani di Kulon Progo, sehingga dengan itu penghasilannya menjadi meningkat.
- c. Batik Geblek Renteng : masyarakat pengrajin batik memproduksi batik dengan motif geblek renteng yang kemudian pemerintah mewajibkan PNS maupun siswa untuk menggunakan seragam dengan motif geblek renteng. Dengan hal ini permintaan pasar yang besar kemudian berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan perajin batik di Kulon Progo.
- d. Bela Beli Proyek Infrastruktur: dalam membangun proyek infrastruktur harus menggunakan bahan baku yang didapat dari produksi masyarakat Kulon Progo itu sendiri.

2. TOMIRA (Toko Milik Rakyat)

Kebijakan ini dibuat untuk melindungi usaha rakyat dari toko modern yang kian lama menjamur di Indonesia yang berdampak pada matinya usaha-usaha kecil masyarakat. Sehingga dengan hal itu pemerintah membuat kebijakan untuk melindungi usaha kecil masyarakat dari toko modern, melindungi produk lokal, dan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat.

3. CSR Kulon Progo

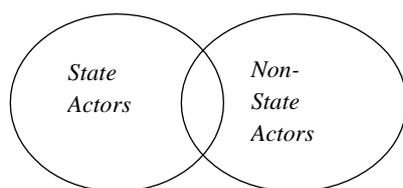
Pemerintah membuat kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk menyisihkan lima persen keuntungan untuk perkembangan desa di Kulon Progo. Selain itu juga menerapkan one village one sister company, dimana dalam hal ini setiap perusahaan memegang satu desa untuk dikembangkan. Dalam menjalankan program yang di buat maka pemerintah menerapkan program tersebut dengan konsep collaborative governance dengan melibatkan aktor dalam kolaborasi atau disebut dengan drivers (penggerak) dalam teori Emerson, Nabatchi, dan Balog (2012). Adapun aktor yang terlibat diantaranya adalah pemerintah baik dari pemerintah pusat dan daerah, Non Governmental Organization (NGO), pihak swasta dan masyarakat (Sururi, 2018)

Masyarakat merupakan obyek sekaligus subyek yang sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui paradigma pembangunan alternatif (Purwowibowo., 2018) Program dan kebijakan dalam paradigma pembangunan alternatif kabupaten Kulon Progo tersebut aktif melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat sebagai participatory governance dalam mendorong adanya keterlibatan masyarakat

(civic engagement) mulai dari mengidentifikasi masalah yang ada di daerah mereka sekaligus juga memformulasikan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut (Totok & Poerwoko Soebiato, 2019). Program pemerintah kabupaten Kulon Progo yang meliputi Bela Beli Kulon Progo, Batik Geblek Renteng, GAPOKTAN, One Village One Sister Company mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini merupakan usaha bersama dari masyarakat, oleh masyarakat, dan kembali untuk masyarakat.

Penelitian dengan judul, "Collaborative Governance dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa Kohod" yang di tulis oleh Siti Yulyanah dan Riska Sarofah dalam penelitiannya memiliki hasil penelitian bahwa collaborative governance efektif diterapkan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dalam penelitian ini stakeholder yang terlibat adalah OASE (Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja), Pemerintah Pusat dan Daerah, hingga Pemerintah Desa bersama dengan pihak swasta melalui CSR saling berkolaborasi bersama untuk memberdayakan masyarakat meskipun belum menghasilkan penurunan angka kemiskinan yang signifikan namun menunjukkan proses kolaborasi membuat masyarakat menjadi mandiri dan memiliki infrastruktur yang cukup memadai (Yulyanah & Sarofah, 2019). Dalam penelitian, "Strategi Tata Kelola Kolaboratif antara Aktor Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan," menjelaskan bahwasanya tata kelola kolaboratif yang dilakukan oleh Grameen Bank di Bangladesh bahwa konsep mendasar dalam pengentasan kemiskinan dapat di dorong melalui pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme social collateral, sistem ini membentuk sistem ketahanan sosial masyarakat (Putra, 2019).

Berdasarkan penjabaran tersebut, masyarakat sebagai aktor penting dalam mengimplementasikan Collaborative Governance Regime (CGR). Dalam menjalankan CGR memiliki beberapa aktor yang terlibat dalam tata kelola kolaborasi sehingga dalam mengimplementasikannya dapat menghasilkan Collaborative Actions (Yulyanah & Sarofah, 2019) Aktor yang terlibat dalam tata kelola kolaboratif terdiri dari State Actors dan Non-state Actors yang saling berkaitan satu dengan lainnya (Sururi, 2018)



Gambar 5. Hubungan State Actors dan Non-State Actors

State Actors :

- a. Pemerintah Pusat : Sebagai aktor yang membuat regulasi atau kebijakan dan sarana strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan secara Nasional. Selain itu juga mengelola penggerak (drivers) untuk mengelola CGR (collaborative governance regime), serta memberikan modal kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan program dalam bentuk Collaborative Actions, misalnya dengan pemberian dana desa.
- b. Pemerintah Daerah : sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, selain itu juga membuat program yang sesuai dengan kondisi geografis, sosiologis dan aspek lainnya untuk mengentaskan kemiskinan. Sebagai penggerak (drivers) yang mengkoordinasikan dengan lembaga lain yang terlibat.

Non-State Actors :

- a. Pihak Swasta : terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menjalin kerjasama atau berinvestasi melalui Corporate Social Responsibility (CSR) yang diatur dan dibatasi dengan regulasi. Kabupaten Kulon Progo memiliki program yang secara langsung melibatkan CSR dalam program One Village One Sister Company.
- b. NGO (Non Governmental Organization) : terdiri dari LSM yang bergerak dalam berbagai bidang serta lembaga filantropi yang memberikan pemberdayaan pada masyarakat.
- c. Masyarakat : sebagai subyek dan obyek dari program pengentasan kemiskinan, masyarakat diharapkan dapat membentuk ketahanan sosial dengan mandiri secara ekonomi.

Aktor yang terlibat dalam tata kelola kolaboratif akan menjalankan sistem collaborative dynamics dengan tiga komponen menurut Emerson, dkk yaitu pelibatan prinsip (principled engagement); motivasi bersama (shared motivation); dan kemampuan untuk melakukan tindakan (capacity for joint action) sehingga menghasilkan collaborative actions yang memberikan implikasi pada pengentasan kemiskinan (Alamsyah et al., 2019).

5. SIMPULAN

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks bagi bangsa Indonesia. Kemiskinan yang terjadi disebabkan oleh kemiskinan alami maupun kemiskinan buatan. Konsep collaborative governance dengan menerapkan program pembangunan paradigm alternatif dapat diterapkan sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Menurut Undang-

Undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan daerah sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk membuat program dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Konsep tata kelola kolaboratif dilaksanakan dalam menjalankan program-program pengentasan kemiskinan. Kabupaten Kulon Progo menerapkan konsep tata kelola kolaboratif atau Collaborative Governance Regime (CGR) dalam menjalankan paradigma pembangunan alternatif. Aktor yang terlibat dalam menjalankan CGR terdiri dari State Actors dan Non- state Actors. State actors terdiri dari lembaga pemerintah baik dari pusat maupun daerah, sedangkan non-state actors terdiri dari pihak swasta, LSM, dan masyarakat. Aktor-aktor yang terlibat saling bekerjasama secara aktif dan interaktif dalam menjalankan CGR dalam mengimplementasikan program sehingga menghasilkan collaborative actions. Hasil dari collaborative actions memberikan outcome dalam membentuk ketahanan sosial masyarakat melalui pemberdayaan sehingga mandiri secara ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, D., Mustari, N., Hardi, R., & Mone, A. (2019). Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 4(2), 112. <https://doi.org/10.24903/fpb.v4i2.748>
- Anisa, N. (2016). Perbedaan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Education*, 7. https://www.slideshare.net/nadia_anisa22/perbedaan-penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Hudayana, I., & Nurhadi, N. (2020). Memaknai Realitas Kemiskinan Kultural di Pedesaan: Sebuah Pendekatan Partisipatoris. *Journal of Social Development Studies*, 1(1), 14–26. <https://doi.org/10.22146/jsds.205>
- Husain, W. (2019). Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal AKSARA 25. 6(1), 25–30. Retrieved from <http://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/AKSARA/index>
- Kurniasih, D.-. (2017). Model Penguatan Kelembagaan Pada Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (Slbm) Di Kabupaten Banyumas (Suatu Pendekatan Collaborative Governance). *Sosiohumaniora*, 19(1), 1–7. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.7888>
- Mumin, N. (2019). Prespektif Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Karta Negara. *Jurnal Justice*, 1, 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Mussadun, & Nurpratiwi, P. (2016). Kajian Penyebab Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Kampung Tambak Lorok. *Journal of Regional and City Planning*, 27(1), 49–67. <https://doi.org/10.5614/jrcp.2016.27.1.5>
- Purnomo.Priyo, E., Ramdani, R., Setyadiharja, R., & Muzwardi, A. (2018). Tata Kelola Hutan Berbasis Masyarakat. In *Collaborative Governance*.
- Purnomo, E. P. (2020). Collaboration Government and CSR A Case Study of Suku Anak Dalam in Pompa Air village , Jambi-Indonesia. *International Journal of Academic Research in Business, Arts, and Science (IARBAS.COM)*, 2(1), 19–39. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3632103>
- Purwowibowo, P., Hendrijanto, K., & Soelistijono, P. A. (2018). Peningkatan Kapasitas Manusia Sebagai Fokus dari People Centered Development. *Aristo*, 6(2), 283. <https://doi.org/10.24269/ars.v6i2.1068>
- Putra, H. S. (2019). *Jurnal Analis Kebijakan | Vol. 3 No. 1 Tahun 2019*. 3(1).
- Razali, T. M., & Putri, D. M. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Tahun 2018. 58–134.
- Rizal, M., Sumaryati, E., & Suprihana. (2016). “Agrika”, V. 33, 69–84.
- Robinson, T., Kern, M., Sero, R., & Thomas, C. W. (2020). How Collaborative Governance Practitioners Can Assess the Effectiveness of Collaborative Environmental Governance, While Also Evaluating Their Own Services [JOUR]. *Society & Natural Resources*, 33(4), 524–537. <https://doi.org/10.1080/08941920.2019.1668990>
- Selewang, A., & Setyono, S. J. (2020). *Teknik pwk*. 9(2), 92–106.
- Sururi, A. (2018). Collaborative Governance In The Development Of Rural Areas (Review of the Draft and Regulation). *Humanika*, 25(1), 200–208. Retrieved from <http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824>
- Suswanta., Efendi., & S. (2017). Dalam Prespektif Stakeholder Collaborative Governance. *Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dalam Prespektif Stakeholder Collaborative Governance Studi Di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur*, 1–13.
- Sutiono, B., & Musyafiq, A. R. (2020). Analisa pengaruh pelaksanaan program corporate social responsibility terhadap pemeentukan karakter socioprenuer di kota yogyakarta Analysis of the influence of the implementation of corporate social responsibility. 17(1), 148–156.
- Totok, M., & Poerwoko Soebiato. (2019). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Alfabeta*, 1(1), 7–8.
- Yulyanah, S., & Sarofah, R. (2019). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Untuk Pengentasan Kemiskinan Collaborative Governance In Management Of Coastal Areas For Poverty Alleviation. 1–6.
- Undang-Undang :
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
Website :
Website Badan Pusat Statistik www.bps.go.id Diakses tanggal 19 Maret 2020
- Website Kabupaten Kulon Progo. www.kulonprogokab.go.id/. Diakses tanggal 19 Maret 2020
- Website BPS Yogyakarta <https://yogyakarta.bps.go.id> . Diakses tanggal 19 Maret 2020
- Website BPS Kulon Progo <https://kulonprogokab.bps.go.id> . Diakses tanggal 19 Maret 2020